



LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN

SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI

PADA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

SURABAYA



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

SEMESTER II PERIODE JULI - DESEMBER

TAHUN 2022



LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
SURABAYA**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017**

Disahkan di Surabaya

Pada 30 Desember 2022



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat selalu diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan oleh semua jajaran aparatur negara pada semua tingkatan di jajaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Adapun kegiatan yang mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada masyarakat adalah dengan mengadakan Survei Indeks Persepsi Korupsi untuk membangun Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Outcome dari pembangunan Zona Integritas adalah terbentuknya WBK/WBBM di satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Pembangunan WBK dan WBBM secara bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya khususnya dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada umumnya. Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan dan perubahan peraturan yang memuat indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK dan WBBM, yang mengarah kepada terwujudnya *zero tolerance approach* (pendekatan tanpa toleransi) dalam pemberantasan korupsi. Perjalanan untuk mencapai Visi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan badan peradilan yang agung khususnya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membutuhkan integritas, kerja keras, komitmen, keyakinan dan kerjasama.

Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

**DAFTAR ISI***Halaman*

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Landasan Hukum	1
1.4 Rencana Kerja.....	2

BAB II METODOLOGI

2,1 Metode Penelitian	3
2.2 Populasi dan Sampel.....	3
2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	3
2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	3
2.5 Teknik Analisa Data.....	3
2.6 Tahapan Pelaksanaan.....	4

BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1 Profil Responden	6
3.2 Indeks Persepsi Korupsi PerIndikator	7
3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerjapada Pengadilan	11
3.4 Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan	12

BAB IV PENUTUP

4,1 Kesimpulan.....	13
4.2 Rekomendasi.....	13

LAMPIRAN

**DAFTAR TABEL**

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
2.1 Model Alur Penyusunan Survei IPK Menuju Zona Integritas	4
2.2 Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi	5
2.3 Nilai Indeks Persepsi Korupsi	5
3.1 Jenis Kelamin Responden	6
3.2 Tingkat Pendidikan Responden	6
3.3 Jenis Pekerjaan Responden	7
3.4 Kelompok Usia Responden	7
3.5 Indeks Indikator Manipulasi Peraturan	8
3.6 Indeks Indikator Penyalahgunaan Jabatan	8
3.7 Indeks Indikator Menjual Pengaruh.....	8
3.8 Indeks Indikator Transaksi Biaya.....	9
3.9 Indeks Indikator Biaya Tambahan.....	9
3.10 Indeks Indikator Hadiah	9
3.11 Indeks Indikator Transparansi Biaya.....	10
3.12 Indeks Indikator Percaloan	10
3.13 Indeks Indikator Perbuatan Curang	10
3.14 Indeks Indikator Transaksi Rahasia	11
4 Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	11



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya di luar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- f. Peraturan Menteri PAN & RB 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.



- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

1.4 Rencana Kerja

1.4.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei indeks persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3 Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per semester (dua kali dalam satu tahun).



BAB II METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik **accidental sampling**. **Accidental sampling** adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3 Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu seluruh Wilayah Hukum Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu enam bulan dan responden ditentukan berdasarkan teknik sampel Morgan & Krejcie. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6 Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan.

Adapun alur penyusunan **tools** untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawahini:

Tabel 2.1
Model Alur Penyusunan Survei IPK Menuju Zona Integritas





Tabel 2.2
Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2.3
Nilai Indeks Persepsi Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Pelayanan		
			Mutu	Kinerja	
1	1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik	Bersih dari korupsi



BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1 Profil Responden

3.1.1 Jenis Kelamin Responden

Dari sisi jenis kelamin responden, menunjukkan bahwa sebesar 41,67% (**5 orang**) responden pengguna layanan satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memiliki jenis kelamin sebagai **Laki-Laki** dan 58,3% (**7 orang**) berjenis kelamin **Perempuan**.

Tabel 3.1
Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kemin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki – Laki	5	41,67
2	Perempuan	6	58,3
Jumlah :		12	100,00

3.1.2 Tingkat Pendidikan Responden

Dari sisi tingkat pendidikan responden, menunjukkan bahwa sebesar **50% (6 orang)** responden pengguna layanan satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memiliki pendidikan Strata Satu (S1), dengan Tingkat Pendidikan Diploma sebesar **25% (3 orang)** dan responden lulusan SLTA sebesar **25% (3 orang)**.

Tabel 3.2
Tingkat Pendidikan Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	0	0,00
2	SD	0	0,00
3	SMP / SLTP	0	0,00
4	SLTA	3	25,00
5	D1/D2/D3/D4	3	25,00
6	S1	6	50,00
7	Pasca Sarjana	0	0,00
8	Tidak mencantumkan pendidikan	0	0,00
Jumlah :		12	100,00

3.1.3 Jenis Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 50% (**6 orang**) responden pengguna layanan satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memiliki pekerjaan sebagai **Pegawai Swasta**, 25% sebagai **Wiraswasta**, dan 25% sebagai **Pelajar/Mahasiswa**.

Tabel 3.3
Jenis Pekerjaan Responden

No.	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Persentase (%)
1	PNS	0	0,00
2	TNI / Polri	0	0,00
3	Pegawai Swasta	6	50,00
4	Wiraswasta	3	25,00
5	Petani / Nelayan	0	0,00
6	Pedagang	0	0,00
7	Pelajar / Mahasiswa	3	25,00
8	Lainnya -----	0	0,00
Jumlah :		12	100,00

3.1.4 Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara **30 tahun s/d 60 tahun**.

Tabel 3.4
Kelompok Usia Responden

No.	Usia / Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	16 - 20	1	8,3
2	21 - 30	6	50
3	31 - 40	3	25
4	41 - 50	1	8,3
5	51 - 60	1	8,3
6	61 - 70	0	0,00
Jumlah :		12	100,00

3.2 Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,5**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya bersih dari tindakan manipulasi peraturan.

Tabel 3.5.
Indeks Indikator Manipulasi Peraturan

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu Manipulasi Peraturan	1	0	0,00	0,00
2	Sering Manipulasi Peraturan	2	0	0,00	0,00
3	Jarang Manipulasi Peraturan	3	6	50,00	2,00
4	Tidak ada Manipulasi Peraturan	4	6	50,00	2,00
Jumlah :			12	100,00	4,00

3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,75**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **bersih dari tindakan penyalahgunaan jabatan**.

Tabel 3.6
Indeks Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu menyalahgunakan jabatan	1	0	0,00	0,00
2	Sering menyalahgunakan jabatan	2	0	0,00	0,00
3	Jarang menyalahgunakan jabatan	3	3	25,00	1,00
4	Tidak ada penyalahgunaan jabatan	4	9	75,00	3,00
Jumlah :			12	100,00	4,00

3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,75**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **bersih dari tindakan menjual pengaruh**.

Tabel 3.7
Indeks Indikator Menjual Pengaruh

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu menjual pengaruh	1	0	0,00	0,00
2	Sering menjual pengaruh	2	0	0,00	0,00
3	Jarang menjual pengaruh	3	3	25,00	1,00
4	Tidak ada penjualan pengaruh	4	9	75,00	3,00
Jumlah :			12	100,00	4,00

3.2.4 Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,25**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya **bersih dari adanya transaksi biaya.**

Tabel 3.8
Indeks Indikator Transaksi Biaya

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu ada transaksi biaya	1	0	0,00	0,00
2	Sering ada transaksi biaya	2	3	25,00	1,00
3	Jarang ada transaksi biaya	3	3	25,00	1,00
4	Tidak ada transaksi biaya	4	6	50,00	2,00
Jumlah :			12	100,00	4,00

3.2.5 Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,75.**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **bersih dari adanya biaya tambahan.**

Tabel 3.9
Indeks Indikator Biaya Tambahan

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu ada biaya tambahan	1	0	0,00	0,00
2	Sering ada biaya tambahan	2	0	0,00	0,00
3	Jarang ada biaya tambahan	3	3	25,00	1,00
4	Tidak ada biaya tambahan	4	9	75,00	3,00
Jumlah :			12	100,00	4

3.2.6 Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,75.**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **bersih dari adanya pemberian hadiah.**

Tabel 3.10
Indeks Indikator Hadiah

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu ada hadiah	1	0	0,00	0,00
2	Sering ada hadiah	2	0	0,00	0,00
3	Jarang ada hadiah	3	3	25,00	1,00
4	Tidak ada hadiah	4	9	75,00	3,00
Jumlah :			12	100,00	4,00

3.2.7 Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,75.**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **bersih dari adanya transparansi biaya.**

Tabel 3.11
Indeks Indikator Transparansi Biaya

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu ada tranparansi biaya	1	0	0,00	0,00
2	Sering ada tranparansi biaya	2	0	0,00	0,00
3	Jarang ada tranparansi biaya	3	3	25,00	1,00
4	Tidak ada tranparansi biaya	4	9	75,00	3,00
Jumlah :			12	100,00	4,00

3.2.8 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,5.**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **bersih dari adanya percaloan.**

Tabel 3.12
Indeks Indikator Percaloan

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu ada percaloan	1	0	0,00	0,00
2	Sering ada percaloan	2	0	0,00	0,00
3	Jarang ada percaloan	3	6	50,00	2,00
4	Tidak ada percaloan	4	6	50,00	2,00
Jumlah :			12	100,00	4,00

3.2.9 Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,75.**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **bersih dari adanya perbuatan curang.**

Tabel 3.13
Indeks Indikator Perbuatan Curang

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu ada perbuatan curang	1	0	0,00	0,00
2	Sering ada perbuatan curang	2	0	0,00	0,00
3	Jarang ada perbuatan curang	3	3	25,00	1,00
4	Tidak ada perbuatan curang	4	9	75,00	3,00
Jumlah :			12	100,00	4,00

3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,93.**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **bersih dari adanya transaksi rahasia**.

Tabel 3.14
Indeks Indikator Transaksi Rahasia

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu ada transaksi rahasia	1	0	0,00	0,00
2	Sering ada transaksi rahasia	2	0	0,00	0,00
3	Jarang ada transaksi rahasia	3	3	25,00	1,00
4	Tidak ada transaksi rahasia	4	9	75,00	3,00
Jumlah :			12	100,00	4,00

3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 (sepuluh) indikator tersebut di atas, maka diperoleh **Indeks Persepsi Korupsi (IPK)** satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebesar **91,25** (interval 0-100) / **3,65** (interval 1-4) yang termasuk pada **Mutu A / Sangat Baik dan Bersih dari Korupsi**.

Tabel 4
Indeks Persepsi Korupsi
Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya

No	Ruang Lingkup (RL)	NRR per RL	NRR Tertimbang	IPK per RL	Kinerja
1	Manipulasi Peraturan	3,50	0,35	97,25	Bersih dari korupsi
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,75	0,375	99	Bersih dari korupsi
3	Menjual Pengaruh	3,75	0,375	94,5	Bersih dari korupsi
4	Transaksi Biaya	3,25	0,325	97,25	Bersih dari korupsi
5	Biaya Tambahan	3,75	0,375	97,25	Bersih dari korupsi
6	Hadiah	3,75	0,375	94,5	Bersih dari korupsi
7	Transparansi Biaya	3,75	0,375	98,25	Bersih dari korupsi
8	Percaloan	3,50	0,35	98,25	Bersih dari korupsi
9	Perbuatan Curang	3,75	0,375	98,25	Bersih dari korupsi
10	Traksaksi Rahasia	3,75	0,375	98,25	Bersih dari korupsi
Jumlah NRR Tertimbang :			3,65		Bersih dari korupsi
Indeks Persepsi Korupsi :				91,25	Bersih dari korupsi

Indeks **3,65 / 91,25** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **3,26 – 4,00 / 81,26 – 100,00**.



Tabel 5
Persepsi Indeks Korupsi
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Pelayanan		
			Mutu	Kinerja	
1	1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik	Bersih dari korupsi

3.4 Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah korupsi di satuan kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Adapun masukan dan pandangan dari responden yang mengisi kolom kritik dan saran adalah sebagai berikut:

1. Masukan dan Pandangan Responden 01
 - Ditingkatkan.
2. Masukan dan Pandangan Responden 03
 - Ditingkatkan fasilitas umum.
3. Masukan dan Pandangan Responden 05
 - Lebih baik lagi.
4. Masukan dan Pandangan Responden 07
 - Lebih ditingkatkan lagi.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil survei Indeks Persepsi Korupsi yang telah dilakukan satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memiliki **Indeks Persepsi Korupsi 3,65 / 91,25** atau masuk pada kategori dengan mutu pelayanan **Sangat Baik (A)** dan kinerja pelayanan **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 (sepuluh) indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,50 / 87,50;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,75 / 93,75;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,75 / 93,75;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,25 / 81,25;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,75 / 93,75;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,75 / 93,75;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,75 / 93,75;
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,50 / 87,50;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,75 / 93,75;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,75 / 93,75;

4.2 Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Bulan Juli s/d Desember Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,26 / 81,26 dengan **nilai akhir 3,65 / 91,25**) atau masuk pada persepsi dengan mutu pelayanan **Sangat Baik (A)** dan kinerja pelayanan **bebas dari korupsi**.

Adapun dari saran yang disampaikan responden yang mungkin dapat dipertimbangkan lebih lanjut adalah perlunya peningkatan fasilitas umum di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Akan tetapi, oleh karena tidak adanya keterangan yang spesifik mengenai fasilitas yang dimaksud, maka terhadap keputusan perlu adanya tindak lanjut atau tidak, kebijakan tersebut diserahkan kembali kepada Pimpinan.



Mengetahui,
PANITERA,

Drs. SAMPIRIN HADI S, S.H., M.H.
NIP. 19611008 198503 1 006

Surabaya, 30 Desember 2022
PANITERA MUDA HUKUM,

MUSLICH HIDAJAT, S.H.
NIP. 196402041986031005



LAMPIRAN

ANALISA DATA
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
SEMESTER KE-II TAHUN 2022

NO. RESP	NILAI RUANG LINGKUP PELAYANAN										JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
2	3	4	4	2	4	4	4	3	4	4	36
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
7	3	4	4	2	4	4	4	3	4	4	36
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
10	3	4	4	2	4	4	4	3	4	4	36
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
JUMLAH	42	45	45	39	45	45	45	42	45	45	438
NNR PER RL	3,5	3,75	3,75	3,25	3,75	3,75	3,75	3,5	3,75	3,75	3,65
NNR TERTIMBANG	87,5	93,75	93,75	81,25	93,75	93,75	93,75	87,5	93,75	93,75	91,25



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

JL.KETINTANG MADYA VI NO. 2 SURABAYA
TELP./ FAX : (031) 8292138 – 8288622
KOTAK POS : 21 / SBS.IKIP– KODE POS : 60232
SURABAYA

Nomor Responden : (diisipetugas)

KUISIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr/i Pengguna Layanan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada kesempatan ini bapak/ibu/sdr./i terpilih sebagai responden penelitian kami. Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei ini menayakan pendapat pengguna layanan mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan instansi pemerintah, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untuk kepentingan tersebut kami menyampaikan kuesioner untuk diisi sesuai apa yang dirasakan dan dialami selama mendapatkan pelayanan. Tidak ada jawaban yang benar atau salah sehingga apapun jawaban yang dipilih tidak akan mempengaruhi pelayanan terhadap bapak/ibu/sdr./i.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan bapak/ibu/sdr./i untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surabaya, 11 Juli 2022

Tim Survei



**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
TAHUN 2022**

IDENTITAS RESPONDEN :

1. Nama : _____ (boleh inisial atau tidak diisi)
2. Instansi/Perusahaan : _____
3. Umur(Tahun) : _____
4. JenisKelamin : 1. Laki – laki 2. Perempuan
5. Pendidikanterakhir : 1. Tidak sekolah 5. Diploma (D1/D2/D3/D4)
2. SD 6. Sarjana (S1)
3. SMP/SLTP 7. Pasca Sarjana (S2/S3)
4. SLTA
6. PekerjaanUtama : 1. PNS 5. Petani/Nelayan
2. TNI/Polri 6. Pedagang
3. Pegawai Swasta 7. Pelajar / Mahasiswa
4. Wiraswasta 8. Lainnya _____

PETUNJUK :

- Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondite maupun pelayanan terhadap Bapak/ Ibu/saudara (i), dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
- Cara pengisian Kuesioner
Bapak/Ibu/Saudara(i) memberi tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i).

KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei					
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)	Selalu	Sering	Jarang	Tidak ada	Kode Pengolahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Eksternal					
1.	Apakah pelayanan oleh petugas tidak sesuai prosedur dan ketentuan dan dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan)	1	2	3	4



2.	Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan oleh petugas dengan ada penawaran untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan)	1	2	3	4	
3.	Apakah pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara? (Menjual Pengaruh)	1	2	3	4	
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? (Transaksi Biaya)	1	2	3	4	
5.	Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi dengan ada biaya tambahan? (Biaya Tambahan)	1	2	3	4	
6.	Apakah ada pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta)? (Hadiah)	1	2	3	4	
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? (Transparasi Biaya)	1	2	3	4	
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan? (Percaloan)	1	2	3	4	
9.	Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan? (Perbuatan Curang)	1	2	3	4	
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan? (Transaksi Rahasia)	1	2	3	4	

Saran masukan dan pandangan pengguna layanan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya:



AKSES HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI MELALUI GOOGLE FORM:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ocmNYgNjJhHHaMnKEtAaryoFOqz0vIXqyJY_736gCvc/edit#gid=1264529108

HASIL SURVEY

IDENTITAS RESPONDEN		INDIKATOR		NILAI
20/12/2022 16:15:16		Manipulasi Peraturan (Mempersulit Prosedur)	: Tidak Ada	4
Nama	: Wage triardi ma'roef	Permintaan Imbalan oleh Petugas	: Tidak Ada	4
Alamat	: Surabaya	Tawaran Bantuan Aparatur Pengadilan	: Tidak Ada	4
Usia	: 27	Kemudahan Akses Informasi Biaya Layanan	: Selalu	4
Jenis Kelamin	: Laki-Laki	Adanya Biaya Tambahan	: Tidak Ada	4
Pendidikan	: D3	Adanya Pemberian Hadiah/Tanda Terima Kasih	: Tidak Ada	4
Pekerjaan	: Swasta	Transparansi Biaya Transaksi (Bukti)	: Selalu	4
No. HP.	: 081333551394	Adanya Percaloan dalam Pengurusan Produk Layanan	: Tidak Ada	4
Alamat E-Mail	: Wagetriardi1994@gmail.com	Kesaksian terhadap Praktik KKN di Pengadilan	: Tidak Ada	4
		Pengurusan Perkara oleh Aparatur di luar Pengadilan	: Tidak Ada	4
		Saran Perbaikan	: Di tingkat kan	
				NILAI
20/12/2022 17:55:02		Manipulasi Peraturan (Mempersulit Prosedur)	: Jarang	3
Nama	: M. Aden zaini	Permintaan Imbalan oleh Petugas	: Jarang	3
Alamat	: Sidoarjo	Tawaran Bantuan Aparatur Pengadilan	: Jarang	3
Usia	: 25	Kemudahan Akses Informasi Biaya Layanan	: Sering	3
Jenis Kelamin	: Laki-Laki	Adanya Biaya Tambahan	: Jarang	3
Pendidikan	: S1	Adanya Pemberian Hadiah/Tanda Terima Kasih	: Jarang	3
Pekerjaan	: Wirausaha	Transparansi Biaya Transaksi (Bukti)	: Sering	3



No. HP.	: 085880480483	Adanya Percaloan dalam Pengurusan Produk Layanan	: Jarang	3
Alamat E-Mail	: Adenarsana@gmail.com	Kesaksian terhadap Praktik KKN di Pengadilan	: Jarang	3
		Pengurusan Perkara oleh Aparatur di luar Pengadilan	: Jarang	3
		Saran Perbaikan	: Ditingkatkan fasilitas umum	
				NILAI
21/12/2022 9:03:10		Manipulasi Peraturan (Mempersulit Prosedur)	: Tidak Ada	4
Nama	: Lailatul murod, sh	Permintaan Imbalan oleh Petugas	: Tidak Ada	4
Alamat	: Kota pasuruan	Tawaran Bantuan Aparatur Pengadilan	: Tidak Ada	4
Usia	: 30	Kemudahan Akses Informasi Biaya Layanan	: Selalu	4
Jenis Kelamin	: Perempuan	Adanya Biaya Tambahan	: Tidak Ada	4
Pendidikan	: S1	Adanya Pemberian Hadiah/Tanda Terima Kasih	: Tidak Ada	4
Pekerjaan	: Swasta	Transparansi Biaya Transaksi (Bukti)	: Selalu	4
No. HP.	: 081234081199	Adanya Percaloan dalam Pengurusan Produk Layanan	: Tidak Ada	4
Alamat E-Mail	: lielaczone@gmail.com	Kesaksian terhadap Praktik KKN di Pengadilan	: Tidak Ada	4
		Pengurusan Perkara oleh Aparatur di luar Pengadilan	: Tidak Ada	4
		Saran Perbaikan	: Lebih baik lagi	
				NILAI
21/12/2022 11:09:00		Manipulasi Peraturan (Mempersulit Prosedur)	: Jarang	3
Nama	: Hanifah Mufidatul Ilmi	Permintaan Imbalan oleh Petugas	: Tidak Ada	4
Alamat	: Ds.Sumokembangs Rt.12 Rw.02 Kec.Balombangendo Kan.Sidoarjo	Tawaran Bantuan Aparatur Pengadilan	: Tidak Ada	4
Usia	: 20	Kemudahan Akses Informasi Biaya Layanan	: Jarang	2
Jenis Kelamin	: Perempuan	Adanya Biaya Tambahan	: Tidak Ada	4
Pendidikan	: SD, SMP, SMA	Adanya Pemberian Hadiah/Tanda Terima Kasih	: Jarang	4
Pekerjaan	: Siswa / Mahasiswa	Transparansi Biaya Transaksi (Bukti)	: Sering	4